

**ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

TITIK WIDIYASTUTI

B200130196

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI**

Oleh:

TITIK WIDIYASTUTI

B 200130196

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zulfikar', written in a cursive style.

(Zulfikar, SE, MSi, Dr)

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI

Oleh:

TITIK WIDIYASTUTI
B 200130196

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 03 Februari 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 1. Dr. Zulfikar, SE, MSi | (|  |) |
| Ketua Dewan Penguji | | | |
| 2. Drs. Erma Setiawati, MM, Ak | (|  |) |
| Anggota I Dewan Penguji | | | |
| 3. Dr. Noer Sasangko, SE, MSi, Ak. CA | (|  |) |
| Anggota II Dewan Penguji | | | |

Dekan,



(Drs. Syamsudin, M.M)
NIDN. 00-1702-5701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Februari 2018

Penulis



TITIK WIDIYASTUTI
B 200130196

**ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI**

ABSTRAK

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap visi dan misi instansi dalam bentuk aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemangku kepentingan yang memiliki hak dan wewenang untuk memintapertanggungjawaban tersebut. Peningkatan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten boyolali berdasarkan pendoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 serta mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dinas pendidikan dan kebudayaa. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Boyolali tahun 2015 telah disajikan sesuai dengan pendoman Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. Kinerja instansi berjalan dengan baik, namun masih ada program yang yang belum dicapai secara optimal dengan rencana strategi dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten boyolali.

Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategi (RENSTRA).

ABSTRACT

Performance accountability report on government institution is a form of responsibility to all connected stakeholders who have rights to evaluate the programs. It is important to notice that performance evaluation presenting all enchancement and quality of each program that has been done by the government. It also indicates the level of vision and mission achievements. The research focusing on the education and culture of Boyolali district, The purpose of this study is to know the presentation of performance accountability reports of government agencies boyolali district based on the guidance of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform No. 29 of 2010 and evaluate the performance of government agencies of education and culture. This research was designed using qualitative descriptive method. The result of analysis and discussion shows report of performance accountability of government

institution of education and culture of Boyolali Regency in 2015 has been presented in accordance with the guidance of Regulation of Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 29 year 2010. The performance of the agency is running well, but there are still programs that have not been achieved optimally with the strategic plan of education and culture of boyolali district.

Keywords : Performance Accountability Report of Government Agencies (LAKIP), Strategic Plan (RENSTRA)

1. PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemringtah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti dan Rika, 2015). Sedangkan Menurut Rahmadan (2014) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban untuk disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah.

Dengan dilakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, telah berimplikasi terhadap perubahan paradikma dan pengelolaan pemrintah dan pembangunan yang ada didaerah. Sejalan dengan itu sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintahan Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 merupakan dampak dari perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dimaksu sebagai media informasi sekaligus bentuk akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, jua menjelaskan tingkat

keberhasilan atau kegagalan kinerja yang ingin dicapai organisasi dan diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali dimasa yang akan datang antara lain dengan dilakukannya melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja. Serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas dilingkungan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Perhatian pemerintahan yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dianggap berhasil apabila sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dibawah standar.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pertanggungjawaban dan pelaporan segala aktivitas dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali berdasarkan Permen PAN Nomor.29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menjadi pedoman penyusunan dan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (LAKIP), menyajikan laporan tersebut sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja. Laporan ini disajikan atas berbagai laporan yang sama dari setiap instansi/SKPD melalui hasil evaluasi dan rangkuman berbagai kinerja yang dihasilkan sedangkan tujuan dan amanat laporan tersebut dapat disampaikan.

Menurut Santoso (2013) Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanat. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintahan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintahan tersebut.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata dalam konteks khusus yang dialami dan dimanfaatkan sebagai metode ilmiah (Meleong, 2012: 6). Menurut Sugiono (2012: 59) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya terjun kelapangan.

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu deskriptif dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh

dan nyata mengenai laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrag Kabupaten Boyolali. deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2011:54).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010, LAKIP menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan pencapaian sasaran tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, perlu juga dimasukkan dalam LAKIP mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengkaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Format LAKIP menurut peraturan terdiri atas: ikhtisar eksekutif, pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, rencana strategis, formulir rencana kinerja (RKT), indikator kinerja utama (IKU), formulir perjanjian kinerja, penutup serta lampiran. Di dalam LAKIP juga tersedia laporan capaian kinerja yang menjelaskan tentang berapa persen sasaran atau target kinerja tahun berjalan yang telah terlaksanakan atau tercapai dan kendala apasaja yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut pada kinerja tahun mendatang.

Tabel 1 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

Nomor	Jumlah Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik (A)
2	76% sampai dengan 100%	Baik (B)
3	56% sampai dengan 75%	Cukup Baik (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (D)

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Informasi tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk memberikan keputusan yang strategik. Masih ada beberapa tahapan analisa dan evaluasikerja guna mengidentifikasi factor-faktor pengeban keberhasilan ataupun kegagalan kinerja sehingga manajemen dapat menyimpulkan tentang adanya masalah. Dengan menggunakan skala ordinal, capaian kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 (%)

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5
a. Angka PAUD jumlah siswa TK/RA/Penitipan anak dibandingkan jumlah anak usia 4/6 tahun	77,00	69,80	90,65	B
b. APK SD/MI dan Paket A	101,20	99,35	98,17	B
c. APK SMP/MTs Paket B	98,00	94,20	96,12	B
d. APK SMA/MA/SMK Paket C	70,00	72,89	104,13	A
e. APM SD/MI Paket A	85,00	86,01	101,19	A
f. APM SMP/MTs Paket B	73,48	69,95	95,20	B
g. APM SMA/MA/SMK Paket C	49,19	49,02	99,65	B

h. APS SD/MI	0,03	0,05	97,94	B
i. APS SMP/MTs	0,23	0,21	102,60	A
j. APS SMA/MA/SMK	0,26	0,41	79,73	C
k. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,54	98,40	98,85	B
l. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	99,74	79,33	79,54	C
m. Ratio murid dengan kelas				
SD/MI	17,10	19,02	111,23	A
SMP/MTs	29,32	30,15	102,83	A
SMA/MA/SMK	26,88	28,41	105,69	A
n. Ratio Murid dengan guru				
SD/MI	18,00	12,23	67,94	C
SMP/MTs	10,59	13,71	129,46	A
SMA/MA/SMK	26,88	11,40	42,41	D
o. Ratio murid dengan sekolah				
SD/MI	153,15	119,83	78,24	C
SMP/MTs	441,23	352,65	79,92	C
SMA/MA/SMK	443,66	368,72	83,11	B

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5
SMP/MTs	1,02	0,98	96,08	B

SMA/MA/SMK	1,09	1,03	94,50	B
Angka buta aksara	0,00	0,34	99,66	B

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Upaya yang harus dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali adalah memberikan subsidi pembiayaan atau dana operasional pada mereka masyarakat miskin yang membutuhkan dan memberikan beasiswa kepada anak perprestasi yang tidak mampu serta memberikan akses dan fasilitas yang nyaman khususnya kepada anak di daerah perdesaan.

Tabel 3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 (%)

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5
a. Angka kelulusan	99,00	100	101,01	A
b. Ratio ruang kelas rusak	100	89,11	89,11	B
c. Presentase perpustakaan	88,76	68,71	77,41	B
d. Presentase laboratorium	66,06	86,64	131,15	A
Rata-rata capaian kinerja sasaran			99,67	B

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah keterbatasan anggaran untuk pembangunan ruang atau gedung rusak. Sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali adalah merancang anggaran dari Dana Alokasi khusus (DAK) pembangunan gedung atau ruang rusak dan

meningkatkan sarana prasarana sekolah pada pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Tabel 4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 (%)

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5
a. Angka kelulusan	98,00	99,97	102,01	A
b. Ratio ruang kelas rusak	90,00	87,71	89,11	B
c. Presentase perpustakaan	87,44	89,22	102,04	A
d. Presentase laboratorium	83,56	95,78	114,62	A
Rata-rata capaian kinerja sasaran			101,94	A

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah Masih terdapat gedung/ruang kelas yang kondisinya rusak, belum semua SMA memiliki jumlah ruang kelas sesuai dengan kebutuhan, Belum semua SMA memiliki ruang perpustakaan, laboratorium dan peralatan sesuai dengan kebutuhan, Belum semua SMK memiliki ruang kelas sesuai dengan kebutuhan, Belum semua SMK memiliki ruang praktek dan peralatan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 (%)

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5
SPM PNF	70,00	62,00	88,57	B

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah Mutu pendidik dan tenaga kependidikan umumnya rendah, Sarana dan Prasarana masih terbatas. Maka Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam capaian target kinerja adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidikan non formal/SDM melalui keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan maupun workshop yang diselenggarakan di tingkat provinsi maupun pusat, serta meningkatkan jumlah lembaga pendidikan keterampilan/kursus dan mendorong berkembangnya PKBM/TBM.

Tabel 6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 (%)

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5
SNP	100,00	94,00	94,00	B

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah Standar pendidik dan tenaga kependidikan (baik jumlah dan kualitasnya), yang belum memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6 (%)

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5
Pesentase guru bersertifikasi	93,65	57,68	61,59	C

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja, namun belum dapat berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang Cukup Baik.

Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 7 (%)

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	Kategori
a. Peringkat PORDA	5,00	6,00	80,00	B
b. Jumlah siswa mendapat penghargaan PORDA	21,00	29,00	138,10	A
c. Jumlah Pramuka mendapatkan penghargaan tingkat propinsi	6,00	8,00	133,33	A
Rata-rata capaian kinerja sasaran			117,14	A

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Indikator jumlah siswa mendapat penghargaan PORDA dan jumlah pramuka mendapatkan penghargaan tingkat PORDA termasuk kategori sangat baik. Pada indikator jumlah siswa mendapatkan penghargaan PORDA pada tahun 2015 menargetkan mendali sebanyak 21 (dua puluh satu) dan dapat terrealisasi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) mendali atau capaian kinerja sebesar 138,10%. Pada indikator jumlah pramuka mendapat penghargaan tingkat provinsi menargetkan mendali sebanyak 6 (enam) mendali dan dapat terrealisasi sebanyak 8 (delapan) mendali atau capaian kinerja sebesar 133,33%. Pada dua indikator tersebut program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target

kinerja, sehingga secara umum program atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik.

4. PENUTUP

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan, pemuda, dan olahraga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugasnya secara makro dapat dikatakan berhasil, karena dalam 7 target sasaran yang telah ditetapkan rata-rata dicapai dengan kategori Baik.

Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan melakukan analisis LAKIP secara menyeluruh dan meneliti LAKIP untuk beberapa tahun. Hal tersebut diharapkan dapat mengetahui perkembangan penerapan PERMENPAN dari tahun ketahun serta mengevaluasi LAKIP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, Mei. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Accounting Analisis Jurnal Vol 1 No. 2
- Bastian, Indra. 2006. *Audit Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Cahyani Mega, Utama. 2015. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udyana. ISSN: 2302-8556 Vol. 10 Nomor.3.
- Intruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Jensen, Michael C. and Clifford W. Smith. 1984. *“The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview”*. New York.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. *“Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”*. Journal of Financial Economic. Vol.3, No. 4.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Mahsun, Muhamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPF. Yogyakarta.
- Mandasari, Riharjo. 2015. *“Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruhan: Persuatif Value For Money”*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No.10
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Press
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Press
- Meleong. L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Ramadhan. 2014. *Implikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Good Governance (studi di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)*. Jurnal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
- Rencana Strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Revisi Tahun 2010 Indikati 2011-2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Santoso, Susan. 2013. *“Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. ISSN 2303-1174
- Septiarine S, Nusdal. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 3 Nomor 1
- Shah, A. and Shen, C. 2007. A Primare on Performance Budgeting. *“Budgeting and budgeting institutions Washington, D. C. World Bank”*.
- Sugiyono, 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.